

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Efektivitas Rezim oleh Arild Underdal, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe periode 2019–2024 belum mencapai efektivitas substantif, meskipun menunjukkan capaian kepatuhan administratif yang relatif kuat. Evaluasi dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* sebagaimana dirumuskan dalam kerangka efektivitas rezim (Underdal, 2002).

Pada dimensi *output*, Zimbabwe menunjukkan kepatuhan formal terhadap standar rezim melalui penerbitan Zimbabwe National Diamond Policy 2019, penguatan institusi seperti MMCZ dan ZCDC, serta partisipasi aktif dalam mekanisme *peer review* KPCS. Validasi melalui *Review Visit* tahun 2022 serta penunjukan Zimbabwe sebagai *Chair* Kimberley Process tahun 2023 memperlihatkan adanya pengakuan internasional terhadap kepatuhan administratif tersebut. Dalam kerangka teori, capaian ini menunjukkan keberhasilan pada Level 2 *output*, di mana regulasi domestik telah diselaraskan dengan norma rezim internasional (Underdal, 2002).

Namun demikian, pada dimensi *outcome*, perubahan perilaku aktor domestik belum sepenuhnya konsisten dengan tujuan normatif rezim. Meskipun sistem sertifikasi dan pengawasan teknis diperkuat, berbagai laporan masih mengindikasikan adanya tantangan dalam transparansi rantai

pasok, koordinasi antar-lembaga, serta akuntabilitas aparat di wilayah pertambangan Marange. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif tidak sepenuhnya terkonversi menjadi *behavioral change* yang stabil dan berkelanjutan.

Pada dimensi *impact*, penelitian ini menemukan bahwa KPCS belum secara optimal menyelesaikan akar persoalan kekerasan dan eksploitasi struktural dalam tata kelola berlian Zimbabwe. Permasalahan ini berkaitan dengan karakter isu yang bersifat *malign*, ditandai oleh asimetri kepentingan antara elite politik-militer domestik dan norma internasional, serta adanya *cumulative cleavages* dalam struktur kekuasaan (Underdal, 2002). Tingginya tingkat *problem malignancy* ini tidak diimbangi dengan *problem-solving capacity* yang memadai, terutama karena keterbatasan definisi normatif *conflict diamonds* dalam KPCS yang hanya mencakup pendanaan kelompok pemberontak. Akibatnya, pelanggaran yang melibatkan aktor negara tidak sepenuhnya berada dalam ruang intervensi rezim.

Dalam konteks variabel intervensi, tingkat kolaborasi antara Zimbabwe dan KPCS cenderung berada pada Level 3, yaitu koordinasi berbasis hukum dengan mekanisme evaluasi, namun belum mencapai Level 4 yang menuntut integrasi kebijakan substantif serta koreksi sistemik secara menyeluruh (Miles et al., 2002). Kondisi ini menjelaskan mengapa keberhasilan pada level *output* tidak secara otomatis menghasilkan capaian pada level *impact*.

Dengan demikian, ketidakefektifan KPCS di Zimbabwe bukan

semata-mata akibat lemahnya implementasi domestik, melainkan juga merupakan konsekuensi dari keterbatasan desain normatif rezim itu sendiri. Dalam perspektif efektivitas rezim, kesenjangan antara tujuan kolektif (*collective optimum*) dan kinerja aktual (*actual performance*) menunjukkan bahwa keberhasilan administratif belum cukup untuk menghasilkan penyelesaian masalah secara struktural (Underdal, 2002).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas rezim internasional mensyaratkan keselarasan antara desain normatif, kapasitas institusional, serta dinamika politik domestik. Selama definisi operasional dan mandat KPCS belum disesuaikan dengan kompleksitas empiris kekerasan yang melibatkan aktor negara, efektivitas substantif rezim dalam konteks Zimbabwe akan tetap terbatas (Young, 2011).

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe periode 2019–2024 belum mencapai efektivitas substantif, meskipun telah menunjukkan kepatuhan administratif yang relatif kuat, maka diperlukan sejumlah langkah perbaikan baik pada level internasional maupun domestik. Pada level rezim internasional, KPCS perlu mempertimbangkan reformulasi definisi normatif *conflict diamonds* yang selama ini terbatas pada pendanaan kelompok pemberontak, sehingga tidak mampu menjangkau pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aktor negara. Pembatasan definisional tersebut terbukti membatasi *problem-solving capacity* rezim dalam menghadapi dinamika kekerasan

kontemporer di sektor pertambangan (Underdal, 2002). Perluasan mandat ini penting agar rezim lebih responsif terhadap kompleksitas empiris serta mampu mengurangi kesenjangan antara tujuan kolektif dan kinerja aktual. Selain itu, penguatan mekanisme *peer review* dan *Review Mission* dengan mandat investigatif yang lebih independen dan transparan juga diperlukan guna mendorong tingkat kolaborasi bergerak dari Level 3 menuju Level 4, di mana evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif (Miles et al., 2002).

Di sisi domestik, Pemerintah Zimbabwe perlu memastikan bahwa Zimbabwe National Diamond Policy 2019 tidak berhenti sebagai instrumen kepatuhan formal, tetapi diimplementasikan secara konsisten melalui peningkatan transparansi pelaporan produksi, ekspor, dan distribusi pendapatan sektor berlian. Reformasi tata kelola juga harus diiringi dengan pengawasan independen terhadap aparat keamanan dan aktor operasional di wilayah Marange, karena perubahan perilaku aktor domestik merupakan indikator utama pada dimensi *outcome* dalam kerangka efektivitas rezim (Underdal, 2002). Tanpa transformasi perilaku yang nyata, capaian administratif tidak akan terkonversi menjadi dampak substantif (*impact*). Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam mekanisme monitoring sektor pertambangan dapat membantu mengurangi asimetri kepentingan serta menekan tingkat *problem malignancy* yang selama ini menghambat efektivitas rezim.

Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antar-negara produsen berlian guna

menguji konsistensi pola ketidakefektifan akibat keterbatasan desain normatif KPCS. Pendekatan metodologis yang lebih beragam, termasuk integrasi data kuantitatif, juga dapat digunakan untuk mengukur secara lebih presisi kesenjangan antara *actual performance* dan *collective optimum* sebagaimana dirumuskan dalam teori efektivitas rezim (Underdal, 2002; Young, 2011). Dengan demikian, peningkatan efektivitas KPCS di Zimbabwe mensyaratkan penyesuaian simultan antara pembaruan mandat rezim internasional dan penguatan kapasitas institusional domestik, agar keberhasilan administratif tidak berhenti pada level *output*, tetapi mampu menghasilkan perubahan struktural yang berkelanjutan.